

---

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA: MASA KOLONIAL HINGGA MASA REFORMASI****Eva Tri Cahyanti**

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

email: [etcevatr1993@gmail.com](mailto:etcevatr1993@gmail.com)

***Abstract:** This article will examine the study of Islamic education policies in the archipelago from the colonial period to the present. The purpose of writing this article is to find out how the policies are implemented in Indonesia from time to time. This research is a descriptive study with library research methods. The conclusion from this research is that during the colonial period, Islamic education in Indonesia experienced discrimination and was always neglected. This can be seen from the goals of the colonizers who were none other than their interests. Islamic educational institutions also always accept distinctions, including the implementation of madrasas and Islamic boarding schools. The dualism of education in Indonesia was more clearly seen when visiting the Dutch colonials, developing missionary schools, and implementing Christianization efforts as a whole in the archipelago. After achieving independence, Islamic education in Indonesia began to experience many changes and progress. The existence of equalization of levels and status of schools, school curriculum, and learning strategies have also become more varied, modern, and even adopted from the western education system.*

***Abstrak:** Artikel ini akan mengkaji dinamika kebijakan Pendidikan Islam di Nusantara mulai masa penjajahan kolonial hingga saat ini. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Indonesia dari masa ke masa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode library research. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu pada masa penjajahan, pendidikan Islam di Indonesia mengalami diskriminasi dan selalu dianaktirikan. Hal tersebut terlihat dari tujuan bangsa penjajah yang tidak lain untuk kepentingan mereka sendiri. Lembaga pendidikan Islam juga selalu menerima perbedaan, termasuk upaya penyelenggaraan madrasah dan pesantren. Dualisme pendidikan di Indonesia semakin jelas terlihat saat dengan terang-terangan penjajah Belanda mengembangkan sekolah misionaris dan menerapkan upaya kristenisasi secara menyeluruh di wilayah nusantara. Setelah mencapai kemerdekaan, pendidikan Islam di Indonesia mulai mengalami banyak perubahan dan kemajuan. Adanya penyeteraan jenjang dan status sekolah, kurikulum pelajaran sekolah dan strategi pembelajaran juga menjadi lebih variatif, modern bahkan banyak mengadopsi dari sistem penyelenggaraan pendidikan barat.*

**Keywords:** Pendidikan Islam, kebijakan, kolonial, reformasi

Copyright (c) 2021 Eva Tri Cahyanti

---

Received 10 Juni 2021, Accepted 2 Juli 2021, Published 11 Agustus 2021

Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 2 (2), 2021 181

### PENDAHULUAN

Hakikat pendidikan adalah suatu proses mewariskan nilai kepada manusia untuk menjalani kehidupan. Tanpa bekal pendidikan, manusia sekarang sudah tentu akan sama saja dengan manusia masa dulu<sup>1</sup>. Begitu juga dengan suatu negara tanpa pondasi pendidikan yang kuat dan tinggi bisa dikatakan sebagai negara yang tertinggal. Sebaliknya jika suatu negara memiliki pendidikan yang maju akan dikatakan pula sebagai negara yang maju. Di nusantara perjalanan munculnya hingga berkembangnya pendidikan Islam sangat membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Berbagai strategi, kekompakan dan keselarasan pemikiran untuk mempertahankan, menyelenggarakan dan menyebarluaskan pendidikan Islam dilakukan para pemuda dan tokoh agama bangsa Indonesia dengan gigih.

Berkembangnya pendidikan Islam di Nusantara tercatat seiring dengan masuknya Islam ke Nusantara. Pendidikan Islam yang berkembang di Nusantara telah mengalami banyak perubahan besar. Hal ini terlihat pada bentuk lembaga pendidikan yang semula sederhana dengan sistem tradisional berkembang menjadi lembaga pendidikan yang semi modern seperti lembaga pendidikan berbasis madrasah.<sup>2</sup> Sejarah pendidikan di Indonesia mengalami progress yang cukup panjang dan dapat dikatakan cukup rumit, utamanya berkaitan dengan perkembangan kebijakan pendidikan Islam. Berbagai upaya pembaharuan kurikulum diupayakan untuk memperbaiki kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang ada sekaligus untuk meningkatkan pembangunan daerah maupun pembangunan nasional.<sup>3</sup>

Pada masa pra kemerdekaan baik pada masa penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang, pendidikan Islam dirundung duka yang mendalam akibat program pemerintahan Belanda yang berupaya mengembangkan sekolah missionaris dan kristenisasi. Kebijakan yang diterapkan Belanda dan Jepang tersebut menyebabkan pendidikan di Indonesia mengalami diskriminasi, seperti adanya pemberlakuan pendidikan sistem kasta, tidak diperbolehkannya penduduk pribumi mempelajari pendidikan Islam di negara sendiri, tidak diperbolehkannya penduduk Indonesia menempuh pendidikan sesuai pendidikan yang dialami

---

<sup>1</sup> Mukhibat Mukhibat, "Virtual Pesantren Management in Indonesia: In Knowing Locality, Nationality, and Globality," *Dinamika Ilmu: Jurnal of Education* 20, no. 1 (2020): 123–32.

<sup>2</sup> Muhammad Sholeh Hoddin, "Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi," *Jurnal Ilmiah Iqra'*, Vol 14, no. 1 (2020): 17.

<sup>3</sup> Hoddin, 19.

## **Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Masa Kolonial Hingga Masa Reformasi**

bangsa penjajah serta diharuskannya penduduk pribumi mempelajari pendidikan umum untuk keperluan bangsa penjajah. Sehingga dengan perlakuan diskriminasi yang semakin kerap muncul istilah *dualisme* atau dikotomi pendidikan di Indonesia. Pemberlakuan kebijakan tersebut tidak terlepas dari upaya pemenuhan kepentingan mereka sendiri sebagai bangsa penjajah.

Masa penjajahan Belanda dan Jepang berakhir, sehingga pendidikan Islam mencapai fase baru bagi negara Indonesia yang telah merdeka. Dengan mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman negara, pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan Islam mulai mendapat perhatian yang serius. Pendidikan dan pengajaran agama mulai diberlakukan pada sekolah-sekolah yang berada di bawah binaan pemerintah. Perhatian pemerintah yang semakin serius terhadap pendidikan Islam tersebut pada dasarnya dilandasi pada kondisi yang mengingat bahwa jumlah penduduk Indonesia sebagian besar menganut agama Islam. Berbagai lembaga pendidikan yang berstatus negeri maupun swasta keduanya tidak luput dari perhatian pemerintah orde lama. Banyak lembaga pendidikan dialih statuskan menjadi negeri bahkan pemerintah tanpa enggan memberikan suntikan dana operasional untuk lembaga tersebut. Akan tetapi, implementasi kebijakan pendidikan yang terjadipun juga dirasa belum stabil akibat adanya permasalahan antar petinggi negara yang belum sejalan.<sup>4</sup>

Sejalan dengan pendapat di atas, Moh. Kosim mengemukakan alasan yang sama bahwa suatu proses pendidikan yang dilakukan masyarakat sangat membutuhkan peran dari pemangku kekuasaan. Tanpa keterlibatannya sangat memungkinkan terjadinya konflik dan pertentangan dalam penyelenggaraan pendidikan, terlebih lagi untuk pendidikan Islam yang saat ini masih memulai untuk bangkit dari keterpurukan akibat tekanan masa penjajahan. Maka dari itu, untuk menghindari konflik dan perpecahan sangat dibutuhkan peran dari segala pihak termasuk pemangku kekuasaan.<sup>5</sup>

Beralih dari pemerintahan orde lama, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto menggantikan Presiden Soekarno. Pergantian presiden Indonesia ini menandakan pula pergantian masa yang dikenal dengan istilah orde baru. Di samping itu, pendidikan pada masa ini mulai berusaha mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik, termasuk di dalamnya pendidikan Islam. Sejarah mencatat meskipun berbagai upaya dilakukan untuk

---

<sup>4</sup> Hoddin, 17.

<sup>5</sup> Mohammad Kosim, "Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Pada Masa Orde Lama," *Karsa* Vol 22, no. 1 (Juni 2014): 2.

penyelenggaraan pendidikan Islam yang lebih baik, tetap saja terdapat kekurangannya. Dibalik kebijakan yang diberlakukan memperlihatkan bahwa segala peraturan dan kehidupan bernegara masih bersifat sentralistik.

Menurut Heni Yuningsih, tujuan pokok masa orde baru adalah pada aspek pembangunan dan perkembangan ekonomi saja, bukanlah terkait dengan pendidikannya. Upaya pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan memperbaiki struktur manajemen pemerintahan yang dominan pada kegiatan kemiliterannya.<sup>6</sup> Kemudian Sholeh Hoddin mengemukakan jika orde baru yang dimulai tahun 1966 berupaya menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi hanya pada perbaikan SDM yang ada, meskipun dalam implementasinya bersifat sentralistik atau berpusat pada pemerintahan.<sup>7</sup>

Pada tahun 1998, setelah Presiden Soeharto menandatangani surat kemundurannya, maka era reformasi telah dimulai. Pada masa ini pemerintah lahir sebagai koreksi, perbaikan dan penyempurnaan atas berbagai kebijakan masa orde baru yang masih lemah. Kebijakan baru ini diarahkan pada semua bidang secara menyeluruh, yang ditandai dengan lahirnya regulasi tentang sistem pendidikan nasional.<sup>8</sup> Sholeh Hodden menerangkan bahwa pendidikan Islam seperti mendapat udara segar. Karena pada masa ini sejarah mencatat Indonesia mulai terbebas dari kungkungan kepentingan pemerintah. Kebijakan sistem pendidikan nasional yang mulanya berpusat pada pemerintahan diubah menjadi kebijakan pendidikan yang berpusat pada daerah atau desentralisasi.<sup>9</sup>

Dari persoalan-persoalan kebijakan pendidikan Islam di atas, penulis mencoba menyajikan dinamika pertumbuhan kebijakan pendidikan Islam di Nusantara sejak masa penjajahan kolonial hingga era reformasi baik dari segi pola pendidikan Islam maupun kebijakan-kebijakan pendidikan Islam yang nampak pada masa tersebut secara lebih mendalam.

---

<sup>6</sup> Heni Yuningsih, "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru," *Jurnal Tarbiya* Vol 1, no. 1 (2015): 176.

<sup>7</sup> Hoddin, "Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi.," 18.

<sup>8</sup> Afiful Ikhwan, "Kajian Sosio-Historis Pendidikan Islam Indonesia Era Reformasi," *Jurnal Edukasi* Vol 5, no. 1 (Juni 2017), 31.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif analitik. M. Nazir mengemukakan bahwa penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang pengumpulan datanya melalui penyelidikan buku, macam-macam literatur serta catatan lapangan yang berhubungan dengan fokus permasalahan.<sup>10</sup> Selanjutnya penulis mengkaji dan mengidentifikasi fokus pembahasan dengan berhadapan pada macam-macam literatur yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sejak masa penjajahan hingga masa reformasi. Sumber data pada artikel ini berupa hasil penelitian yang dipublikasikan oleh seorang peneliti, buku, jurnal, artikel serta beberapa pendapat pribadi dari penulis. Karena berupa penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data *literer* dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang sesuai objek atau fokus pembahasan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pendidikan Islam Masa Kolonial Belanda

Penjajahan kolonial Belanda di Indonesia memberikan pengaruh besar pada pendidikan Islam di Indonesia. *Imperiumisasi* dan *misionarisme* adalah dua tujuan terbesar kolonial Belanda saat singgah di Indonesia. Dalam mengembangkan misi *misionarisme*, kolonial Belanda enggan memberikan ampun pada penduduk pribumi yang belajar agama baik di lembaga surau maupun di pesantren. Kolonial Belanda bahkan sering membunuh penduduk pribumi yang beragama Islam dan sedang belajar agama. Misi besar yang dilakukan kolonial Belanda dilakukan secara ketat, bahkan tidak segan mengeluarkan regulasi pembelajaran agama terutama pendidikan Islam bagi rakyat Indonesia.<sup>11</sup>

Pada masa kolonialisme, sistem dan kebijakan pendidikan menjadikan generasi nusantara sebagai pengabdian penjajah Belanda. Hal ini terjadi karena konsep utama pendidikan masa kolonial adalah pendidikan yang mampu mencetak tenaga kerja murah terlatih yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Nur Khoiri, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Ragam, Model Dan Pendekatan* (Semarang: SEAP Publhising, 2017), 124.

<sup>11</sup> Moch Khafidz Fuad Raya, "Sejarah Orientasi Pendidikan Islam di Indonesia (Dari Masa Kolonial hingga Orde Baru)," *Jurnal Pendidikan Islam* Vol 8, no. 2 (November 2018): 231.

dapat dimanfaatkan untuk dipekerjakan oleh penjajah.<sup>12</sup> Kharisul berpendapat sama dengan menjelaskan bahwa pendidikan yang diadakan pemerintah kolonial berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja atau pegawai pemerintah Belanda dengan upah yang murah disamping untuk dimanfaatkan sebagai pegawai VOC dan keluarganya.<sup>13</sup>

Kebijakan pendidikan pada masa Belanda dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang bersifat diskriminasi. Pendidikan dibedakan berdasarkan stratifikasi sosial penduduk pribumi. Hal tersebut sesungguhnya dilandasi oleh rasa takut pemerintah kolonial jika penduduk Indonesia khususnya lulusan madrasah dan pesantren lebih berpendidikan dari tersadar akan pentingnya pendidikan.<sup>14</sup>

Dalam bidang pendidikan, pemerintah kolonial Belanda menerapkan politik etis yang berisi tentang kewajiban penduduk pribumi untuk memperoleh pembelajaran dan wawasan Barat sebanyak mungkin dengan bahasa Belanda sebagai bahasa utamanya. Selain itu semua yang diterima masyarakat pribumi terkait dengan pendidikan harus selalu menyesuaikan kebutuhan penjajah Belanda itu sendiri. Adapun pada tahun 1900-an, sistem pendidikan yang digunakan masih tidak terlepas dari sistem pembagian kasta.<sup>15</sup>

Pada masa pemerintahan Gubernur Djendral Van Den Boss di Batavia tahun 1813-1882, misi kristenisasi dilakukan dengan mewajibkannya pendirian dan pelaksanaan pendidikan agama Kristen pada sekolah-sekolah di setiap wilayah karesidenan. Karena ketakutan pemerintah kolonial yang semakin menjadi-jadi terhadap pendidikan Islam di Indonesia, maka pemerintah kolonial mencetuskan lembaga khusus untuk bertindak sebagai pemantau penyelenggaraan pendidikan Islam dan kehidupan beragama di Indonesia yang disebut dengan *Priesterraden*.<sup>16</sup>

Dari nasihat badan pengawas tersebut pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan baru bernama ordonansi guru 1905 yang berisi bahwa pengajaran agama bisa diselenggarakan setelah mendapat persetujuan dari kolonial Belanda. Kemudian dilanjutkan

---

<sup>12</sup> Hoddin, "Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi.," 22.

<sup>13</sup> Kharisul Wathoni, *Dinamika Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2011), 56.

<sup>14</sup> Sarno Hanipudin, "Pendidikan Islam Di Indonesia Dari Masa Ke Masa," *Matan: Journal of Islam and Muslim Society* Vol 1, no. 1 (October 26, 2019): 43.

<sup>15</sup> Wathoni, *Dinamika Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, 61.

## **Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Masa Kolonial Hingga Masa Reformasi**

pada tahun 1925, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan baru lagi terkait guru yang diperkenankan memberi pelajaran mengaji. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa tidak semua kyai diperbolehkan memberikan pengajian Islam tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Belanda. Peraturan ini pada masa tersebut dikenal dengan istilah ordonansi guru 1925. Lebih ketat dari peraturan sebelumnya, pemerintah Belanda menetapkan kembali peraturan penyelenggaraan pendidikan Islam pada tahun 1932 yang berisi tentang pemberantasan dan penutupan lembaga pendidikan yang tidak disukai dan tidak memiliki izin dari pemerintah Belanda. Peraturan ini dinamakan Ordonansi Sekolah Liar (*Wild School Ordonatie*). Dengan adanya peraturan ini perkembangan pendidikan Islam menjadi sangat terhambat.<sup>17</sup>

Pada awal abad XX mendekati kemerdekaan Indonesia, perubahan penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia mengalami perubahan atas kesediaannya mengadopsi penyelenggaraan pendidikan berupa sistem sekolah. Di samping itu, ilmu-ilmu pengetahuan umum mulai diintegrasikan dalam pendidikan Islam Indonesia dengan menggunakan nama madrasah.<sup>18</sup> Selain itu Moch. Khafid dalam kajiannya menyebutkan bahwa pendidikan Islam di lembaga pesantren juga tidak mengalami kegoyahan sedikitpun. Hal ini terlihat dari pertumbuhan pesantren yang tetap eksis sampai zaman sekarang mesti pada masa kolonial telah dikeluarkan kebijakan yang diskriminatif dan represif terhadapnya.<sup>19</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kebijakan pendidikan yang diberlakukan kolonial Belanda ini sama sekali tidak memberikan keuntungan bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Bahkan dapat disimpulkan jika kebijakan tersebut akan meruntuhkan pendidikan Islam jika tokoh Islam di Indonesia tidak memiliki pengetahuan keislaman yang kuat.

### **Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang**

Setelah terusirnya Penjajah Belanda dari Indonesia pada Maret 1942, kekuasaan atas bangsa Indonesia beralih ke negara Jepang. Ia datang ke nusantara dengan memperkenalkan dirinya sebagai saudara tua yang masih berasal dari wilayah Asia. Selain itu ia juga membawa semangat kemerdekaan dan pembebasan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Sejarah

---

<sup>16</sup> Raya, "Sejarah Orientasi Pendidikan Islam di Indonesia (Dari Masa Kolonial hingga Orde Baru)," 231-232.

<sup>17</sup> Wathoni, *Dinamika Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, 63-64.

<sup>18</sup> Hanipudin, "Pendidikan Islam Di Indonesia Dari Masa Ke Masa," 44.

<sup>19</sup> Raya, "Sejarah Orientasi Pendidikan Islam di Indonesia (Dari Masa Kolonial hingga Orde Baru)," 232.

## Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Masa Kolonial Hingga Masa Reformasi

mencatat kedatangan Jepang juga memberi pengaruh yang cukup besar dalam dinamika pendidikan Islam di Indonesia.

Jepang mencari kekuatan dari bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk kepentingannya menghadapi perang Pasifik. Karena ambisinya untuk memenangkan perang Pasifik sangat besar, maka dengan strategi yang seolah-olah memihak umat Islam Indonesia, berbagai peraturan yang sebelumnya dilarang oleh pemerintah Belanda berangsur-angsur mulai diterapkan di nusantara.<sup>20</sup> Kedatangan Jepang disambut terbuka bahkan dipermudah oleh kelompok-kelompok Islam yang anti-Belanda.<sup>21</sup> Pemerintah Jepang memberikan izin pada sekolah-sekolah yang pernah berada di bawah pengasuhan Belanda. Bahkan lebih dari itu, Jepang juga mengizinkan rakyat Indonesia untuk membuka kembali sekolah yang dibawah asuhan swasta, termasuk di dalamnya sekolah-sekolah Islam.<sup>22</sup> Strategi-strategi Jepang di atas adalah upaya Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar mendapat dukungan secara penuh dalam menghadapi perang Pasifik atau perang dunia II.

Kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang tersebut berbeda jauh dengan kebijakan kolonial Belanda. Jika Belanda menerapkan misi kristenisasi maka Jepang mengabaikan hal tersebut karena misi utama Jepang adalah menipponkan bangsa dan umat Islam di Indonesia sebagaimana yang pernah dilakukannya pada Manchuria, Korea dan Formosa (Taiwan) sebelum Perang Dunia II.<sup>23</sup> Dapat dikatakan penjajahan Jepang bersifat lebih lunak dalam mengatur pendidikan Islam di Indonesia jika dibandingkan masa penjajahan Belanda.

Untuk menanamkan ideologi yang diharapkan, Jepang menganggap perlu memberikan pelatihan pada guru-guru agar memiliki keseragaman. Segala aktivitas yang berkaitan dengan tradisi dan kebudayaan Jepang baik di kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan sekolah serta indoktrinasi ideologi menjadi materi pokok dalam pelatihan tersebut. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama pendidikan juga diberikan pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Jepang tersebut.<sup>24</sup>

Adapun jenjang pendidikan yang diberlakukan dalam sistem pendidikan masa Jepang dapat dibedakan menjadi pendidikan Sekolah Rakyat yang ditempuh selama 6 tahun,

---

<sup>20</sup> Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 37.

<sup>21</sup> Miftahur Rohman, "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang," *Jurnal Pendidikan Agama Islam al-Hikmah* Vol 2, no. 1 (September 2018): 17.

<sup>22</sup> Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia*, 37.

<sup>23</sup> Rohman, "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang," 20.

<sup>24</sup> Wathoni, *Dinamika Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, 67-68.

## **Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Masa Kolonial Hingga Masa Reformasi**

pendidikan lanjutan yang terdiri dari SMP dan sekolah menengah tinggi dengan masing-masing ditempuh selama 3 tahun, pendidikan Kejuruan yang meliputi sekolah vokasional yang terdiri dari bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik dan pertanian serta pendidikan Tinggi.

Sementara itu, untuk memperkuat alasan Jepang mengambil simpati penduduk Indonesia, Jepang mengambil beberapa kebijakan yang meliputi pembaruan nama kantor yang mulanya pada masa Belanda bernama *Kantoor Voor Islamistische Zaken* dengan pemimpin dari kaum orientalis menjadi *Sumubi* yang dipimpin oleh tokoh Islam KH. Hasyim Asy'ari, pemberian kunjungan dan bantuan kepada pondok pesantren yang besar, pemberian izin terhadap pengajaran seni militer bagi pemuda Islam, pemberian izin pendirian Sekolah Tinggi Islam di Jakarta, pemberian izin pada ulama dan pemimpin nasionalis membentuk PETA sebagai cikal bakal TNI saat ini, pemberian izin operasional Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) serta menghilangkan pembagian golongan berdasarkan stratifikasi sosial.<sup>25</sup>

Tujuan pendidikan di zaman penjajahan Jepang tidak banyak yang dapat diuraikan, karena murid hanya disibukkan dengan peperangan. Walaupun kebijakan yang diberlakukan terdapat aspek positif karena penyeragaman sekolah, tapi di sisi lain jumlah sekolah pada masa penjajah Jepang menjadi lebih sedikit dibandingkan masa penjajah Belanda. Begitu pula jumlah murid jenjang SD menurun 30% dan jumlah murid sekolah menengah menurun 90%. Tidak jauh beda dengan jumlah guru, ternyata juga merosot cukup banyak karena beratnya tugas sebagai guru.<sup>26</sup>

Dibalik kekejaman pemerintah Jepang, pendidikan Islam di Indonesia memperoleh banyak keuntungan. Adapun keuntungan yang diperoleh meliputi penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai bidang kegiatan, menjadikan guru lebih kreatif dan inovatif, menjadikan penduduk Indonesia semakin terdidik dalam bela diri, sehingga dapat dijadikan sebagai semangat mencapai kemerdekaan, adanya penyeragaman dan peralihan status lembaga pendidikan menjadi negeri secara merata, meningkatkan semangat patriotisme dan nasionalisme, menjadikan bangsa Indonesia semakin terdidik untuk menjadi pemimpin bagi bangsanya karena masa penjajahan Jepang telah dilatih memegang suatu jabatan serta

---

<sup>25</sup> Wathoni, 68.

<sup>26</sup> Rohman, "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang," 28.

semakin berkembangnya madrasah dan pondok pesantren akibat pengawasan Jepang yang tidak terlalu ketat jika dibanding masa penjajahan kolonial.<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penjajahan Jepang yang menggantikan kekuasaan Belanda di nusantara ternyata memiliki sikap lebih lunak dalam menghadapi pendidikan Islam yang diterapkan di Indonesia. Pengawasan Jepang terfokus pada persiapan dalam menghadapi perang pasifik, sehingga pengawasan terhadap pendidikan memiliki ruang yang sangat longgar. Dengan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Jepang, Indonesia telah memiliki banyak keuntungan. Selain bertambah pesatnya perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, para pemuda bangsa juga telah terlatih dalam berbagai hal, sehingga semangat nasionalisme untuk mencapai kemerdekaan juga terlihat semakin kuat.

### **Pendidikan Islam Masa Orde Lama**

Setelah kepergian penjajah kolonial dan Jepang dari Indonesia, dengan terang-terangan Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Berbagai upaya pembaharuan dilakukan dalam bidang pendidikan dan pengajaran bagi penduduk Indonesia setelah tertindas oleh bangsa penjajah. Setelah mendapat kemerdekaan, upaya pembaharuan pendidikan mulai diperhatikan pemerintah secara serius. Contoh perhatian ini adalah tampak pada upaya Ki Hajar Dewantara sebagai menteri PP&K yang pertama dengan tegas menyatakan bahwa pengajaran agama perlu diberikan di sekolah-sekolah pemerintah.<sup>28</sup> Kebijakan era orde lama ini mengupayakan pengakuan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang berhak mendapatkan fasilitas dari pemerintah seperti pengadaan guru.<sup>29</sup>

Kharisul dalam bukunya menyebutkan bahwa secara intensif dalam memperjuangkan pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga baru yang telah berdiri sejak 3 Januari 1946, yang hingga saat ini dikenal sebagai Departemen Agama.<sup>30</sup> Selanjutnya, dikeluarkanlah Ketetapan Pemerintah No. 1/S.D/1946 tentang pembentukan kementerian agama atas usulan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP).<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Wathoni, *Dinamika Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, 70.

<sup>28</sup> Kosim, "Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Pada Masa Orde Lama," 6.

<sup>29</sup> Fadly Mart Gultom, "Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam Di Indonesia (Studi Tentang PP RI No. 55 Tahun 2007)" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 36.

<sup>30</sup> Wathoni, *Dinamika Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, 82.

<sup>31</sup> Kosim, "Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Pada Masa Orde Lama," 7.

Untuk menghilangkan sistem dikotomi pendidikan dan mencukupi kebutuhan personel Departemen Agama, maka bertepatan dengan tanggal 1 September 1956, disusunlah nota *Islamic Education in Indonesia* terkait pemberian mata pelajaran agama dan pengetahuan umum baik di sekolah negeri maupun di madrasah. Selain itu juga diadakannya pendidikan bagi guru agama dan hakim Islam Negeri.<sup>32</sup>

Moh. Khafid dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pendidikan Islam masa orde lama secara eksplisit terfokus pada dua kegiatan yaitu pengembangan dan pembinaan madrasah serta pendidikan Islam disekolah umum. Orientasi pendidikan Islam pasca kemerdekaan dapat dikatakan sebagai strategi awal untuk menghilangkan sistem dikotomi pendidikan.<sup>33</sup>

### 1. Penyelenggaraan Madrasah

Secara formal, penyelenggaraan pendidikan di madrasah telah diakui sejak tahun 1950. Setelah diberlakukannya UU No. 4 Pasal 10 Tahun 1950, maka siswa yang belajar di madrasah telah dianggap memenuhi kewajiban belajarnya, dengan syarat madrasah tersebut telah memperoleh izin dan pengakuan dari Departemen Agama serta telah memberikan pelajaran agama minimal enam jam seminggu secara teratur sebagai mata pelajaran pokok.

Dalam sistem madrasah, Muhammad Yunus menggagas terkait jenjang pendidikan yang terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu Madrasah Ibtidaiyah yang harus ditempuh selama 6 tahun, Madrasah Tsanawiyah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah Atas dengan lama studi masing-masing selama 4 tahun. Kurikulum yang diberlakukan dalam madrasah harus meliputi sepertiga pelajaran agama kemudian sisanya diperuntukkan pelajaran umum.<sup>34</sup>

### 2. Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum

Pendidikan agama di sekolah pertama kali secara resmi tercantum dalam UU Pendidikan tahun 1950 No. 4 (khusus untuk Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta) dan UU Pendidikan Tahun 1954 No. 20 yang berisi tentang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran agama di sekolah.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Wathoni, *Dinamika Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, 82.

<sup>33</sup> Raya, "Sejarah Orientasi Pendidikan Islam di Indonesia (Dari Masa Kolonial hingga Orde Baru)," 234.

<sup>34</sup> Wathoni, *Dinamika Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, 82-83.

<sup>35</sup> Wathoni, 86.

## **Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Masa Kolonial Hingga Masa Reformasi**

Seiring dengan pendapat di atas, ternyata pondok pesantren pada masa ini belum tersentuh sama sekali. Pemberian pengetahuan pendidikan Islam terus diajarkan di dalam pesantren. Walaupun keberadaan pesantren tidak terpengaruh oleh pendirian madrasah, namun para pemimpin pesantren dalam hal ini kyai tetap saja menganggap bahwa dualisme pendidikan terkait kelembagaan masih ada.<sup>36</sup> Beberapa waktu kemudian, madrasah-madrasah mulai didirikan pada pesantren tradisional atas anjuran dari pemerintah. Namun pada saat itu, beberapa kalangan pesantren memrotes secara keras karena menganggap pesantren secara perlahan akan hilang dan terganti oleh keberadaan madrasah.<sup>37</sup>

Atas dasar peraturan-peraturan yang telah diberlakukan, dapat disimpulkan jika masa pemerintah orde baru semakin gencar mengupayakan perbaikan-perbaikan untuk menyelenggarakan pendidikan. Termasuk diantaranya pengintegrasian sekolah umum dan madrasah serta perbaikan penyelenggaraan pesantren. Selain itu, pemerintah mulai menyetarakan keberadaan madrasah, sekolah umum dan pesantren. Dengan bantuan Kementerian Agama bagian pendidikan, penyelenggaran pendidikan agama telah diatur sebaik mungkin agar tidak terjadi dualitas pendidikan lagi. Meskipun pada kenyataannya anggapan dualitas tersebut masih tetap ada dalam pandangan tokoh ulama maupun tokoh pendidikan umum.

### **Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru**

Bangsa Indonesia mengalami tahap baru setelah terjadinya peristiwa G 30 S/PKI pada 1 Oktober 1965. Fase ini dalam catatan sejarah dikenal sebagai orde baru.<sup>38</sup> Pemerintahan orde baru berupaya untuk menghentikan dan mengoreksi penyelewangan atas Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil maupun spirituil juga merupakan salah satu misi pemerintahan orde baru.<sup>39</sup>

Setelah peristiwa pemberontakan oleh kaum komunis, pemerintah orde baru mulai bersungguh-sungguh untuk merealisasikan cita-cita Presiden Soekarno tentang lembaga pendidikan Islam sebagai tempat untuk pembentukan kepribadian bangsa yang masih terpengaruh oleh sisa-sisa komunisme. Cita-cita tersebut tertuang dalam Tap MPRS No.

---

<sup>36</sup> Raya, "Sejarah Orientasi Pendidikan Islam di Indonesia (Dari Masa Kolonial hingga Orde Baru)," 234.

<sup>37</sup> Raya, 235.

<sup>38</sup> Wathoni, *Dinamika Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, 87.

<sup>39</sup> Mart Gultom, "Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam Di Indonesia (Studi Tentang PP RI No. 55 Tahun 2007)," 40.

XXVII/MPRS/1966 bab II pasal 3. Untuk itu pengajaran agama di sekolah atau madrasah harus lebih diperhatikan dan tetap mendapat perhatian.<sup>40</sup>

Pada masa awal orde baru, unsur politik dan sentralistik masih mewarnai konsep penataan negara. Bahkan rancangan pendidikan dan pelaksanaannya tidak lepas dari unsur tersebut. Kebijakan pemerintah yang berbau politik dalam segala hal tersebut menjadikan sekelompok generasi menolak pandangan dan pemikiran rezim orde baru itu. Sekelompok mahasiswa itu memelopori penolakan atas semua ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Kemudian, setahap demi setahap kemajuan pendidikan Islam mulai dirasakan oleh bangsa Indonesia. Dalam lingkup pesantren tradisional mulai didirikannya madrasah sebagai tempat belajarnya. Berbagai kurikulum dan penyetaraan madrasah dengan sekolah umum mulai dirasakan setelah tahun 1959.<sup>41</sup>

Kemudian, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di madrasah, Departemen Agama mengeluarkan kebijakan yang cukup mendasar berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Agama yang berisi solusi terhadap pengakuan keberadaan madrasah yang menjadi kekhawatiran masyarakat dan juga kepastian pendidikan madrasah yang mengarah pada sistem pendidikan nasional yang terintegrasi.<sup>42</sup>

Dalam mengevaluasi pendidikan di Indonesia, gagasan terkait diwajibkannya pendidikan agama di sekolah dasar hingga perguruan tinggi masih menjadi pokok pembahasan yang dikemukakan oleh MPRS.<sup>43</sup> Masuk era 90-an, muncullah UU No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional yang berisi perwujudan dari misi pemerintah dalam rangka memperkecil pola dualisme dalam bidang pendidikan.<sup>44</sup> Dalam rangka mencapai tujuan bangsa Indonesia, keberadaan lembaga baik lembaga pendidikan maupun sosial menjadi pusat perhatian pada masa itu.<sup>45</sup> Adapun kurikulum yang berlaku selama

---

<sup>40</sup> Raya, "Sejarah Orientasi Pendidikan Islam di Indonesia (Dari Masa Kolonial hingga Orde Baru)," 237.

<sup>41</sup> Yuningsih, "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru," 182-183.

<sup>42</sup> Yuningsih, 184.

<sup>43</sup> Saiful Anwar, "Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia (Zaman Orde Baru Dan Reformasi)," *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam* Vol 6, no. 2 (August 1, 2019): 89.

<sup>44</sup> Raya, "Sejarah Orientasi Pendidikan Islam di Indonesia (Dari Masa Kolonial hingga Orde Baru)," 328.

<sup>45</sup> Wathoni, *Dinamika Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, 90.

## **Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Masa Kolonial Hingga Masa Reformasi**

pemerintahan orde baru meliputi kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984 serta kurikulum 1994 yang memasukkan bahasa daerah masing-masing.<sup>46</sup>

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan orde baru khususnya pendidikan Islam mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Dibuktikan dengan dikeluarkannya kebijakan terkait konvergensi dan integrasi pendidikan Islam dan pendidikan umum. Lebih dari itu, pemerintah juga peduli terhadap perkembangan pesantren dengan memperhatikan status kelembagaannya. Pemerintah juga memberikan pembaharuan-pembaharuan pada kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia.

### **Kebijakan Pendidikan Islam Masa Reformasi**

Dengan latar belakang peristiwa moneter bangsa Indonesia tahun 1998, menjadikan kekuasaan Soeharto beralih tangan pada K.H. Abdurrahman Wahid (Gusdur). Berbagai wacana dilakukan dalam rangka menyelaraskan pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Diantaranya mengubah nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan Nasional. Namun, kebijakan tersebut berakhir sebagai wacana saja dan tidak dapat direalisasikan.<sup>47</sup>

Pada era reformasi, pemerintah RI mengeluarkan sebuah UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 sebagai pengganti UU No. 2 Tahun 1989. Dari UU tersebut diketahui bahwa setiap siswa berhak memperoleh pengajaran agama oleh guru yang seagama. Selain itu, UU ini juga berisi pengakuan bahwa pendidikan yang diselenggarakan di pesantren setara dengan pendidikan formal yang diselenggarakan di sekolah-sekolah umum.<sup>48</sup>

Pengesahan RUU RI No. 20 Tahun 2003 sejatinya tidak berjalan dengan lancar dikarenakan munculnya perdebatan dikalangan anggota DPR. Masing-masing golongan DPR menginginkan agar diintegrasikannya pola pikir dan kepentingannya untuk diakomodasikan dalam sistem pendidikan nasional, termasuk di dalamnya terkait pendidikan agama. Kaum Nasrani dan golongan komunis menolak pendidikan agama masuk dalam sistem pendidikan nasional, hal ini didasarkan pada alasannya agar sewaktu-waktu bisa dicabut tanpa melibatkan DPR.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Anwar, "Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia (Zaman Orde Baru Dan Reformasi)," 89.

<sup>47</sup> Mart Gultom, "Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam Di Indonesia (Studi Tentang PP RI No. 55 Tahun 2007)," 44.

<sup>48</sup> Wathoni, *Dinamika Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, 94-95.

<sup>49</sup> Mart Gultom, "Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam Di Indonesia (Studi Tentang PP RI No. 55 Tahun 2007)," 45.

## **Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Masa Kolonial Hingga Masa Reformasi**

Terlepas dari perdebatan pengesahan RUU Sisdiknas tersebut. Umat Islam merasa bersyukur karena pendidikan Islam kini mulai diakui dalam sistem pendidikan nasional setelah sekian lama kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Dengan pengesahan RUU tersebut maka saat ini pendidikan Islam memiliki status yang sama dengan pendidikan umum dalam sistem pendidikan nasional. Selaian itu, madrasah diniyah dan pesantren juga mulai mendapat pengakuan dari pemerintah Indonesia dengan alasan keduanya merupakan wujud atau bentuk dari pendidikan keagamaan.<sup>50</sup>

Regulasi pendidikan Islam selanjutnya muncul berkaitan dengan profesi guru dan dosen yang sudah selayaknya memperoleh kesejahteraan dan apresiasi baik dari perlindungan maupun jaminan hak dalam kesejahteraannya. Peraturan tersebut termuat dalam Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005. Kemudian selanjutnya juga menyusul dikeluarkannya UU RI No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan.<sup>51</sup>

Berbagai kurikulum pendidikan diberlakukan dengan sifatnya yang lebih beragam dan menyesuaikan kebutuhan siswa serta masyarakat. Adapun kurikulum yang diberlakukan setelah berakhirnya masa orde baru diantaranya Kurikulum Berbasis Kompetensi (2004) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (2006). Sampai pada tahun 2013, kurikulum 2013 menjadi kurikulum terakhir yang dipakai hingga saat ini. Dalam implementasinya di dunia pendidikan, kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya sebagai jawaban atas tuntutan penyelenggaraan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan (IPTEK) yang semakin canggih.<sup>52</sup> Dengan diakuhinya madrasah diniyah dan juga pesantren sebagai lembaga pendidikan dalam sistem pendidikan nasional, maka pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam semakin maju dan juga pesat.<sup>53</sup> Selain hal tersebut samping hal tersebut juga dapat diketahui bahwa penyeragaman materi, status kelembagaan maupun kurikulum lebih mendapat perhatian yang lebih eksklusif pada masa reformasi ini.

---

<sup>50</sup> Mart Gultom, 46.

<sup>51</sup> Wathoni, *Dinamika Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, 95-96.

<sup>52</sup> Hoddin, "Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi," 28.

<sup>53</sup> M Mukhibat, "The Teaching Management and Study of Hadith: Method, Contents, and Approaches" 24 (2019): 11.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dinamika pendidikan Islam telah mengalami kemajuan setahap demi setahap. Meskipun pada masa pra kemerdekaan pendidikan Islam mengalami diskriminasi yang sangat menimbulkan keresahan bagi rakyat pribumi. Kemudian pasca kemerdekaan dinamika pendidikan Islam mulai berupaya untuk terselenggara di lembaga-lembaga pendidikan baik, di pondok, pesantren, surau, langgar, madrasah bahkan di sekolah umum. Kebijakan dari proses penyelenggaraan sampai dikeluarkannya regulasi terkait sistem pendidikan nasional diberlakukan demi upaya untuk menghilangkan dualistis pendidikan yang mulai mengakar sejak masa kolonial pada pendidikan di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, Saiful. "Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia (Zaman Orde Baru Dan Reformasi)." *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam* Vol 6, no. 2 (August 1, 2019).
- Hanipudin, Sarno. "Pendidikan Islam Di Indonesia Dari Masa Ke Masa." *Matan: Journal of Islam and Muslim Society* Vol 1, no. 1 (October 26, 2019): 39.
- Hoddin, Muhammad Sholeh. "Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi." *Jurnal Ilmiah Iqra'*, Vol 14, no. 1 (2020).
- Ikhwan, Afiful. "Kajian Sosio-Historis Pendidikan Islam Indonesia Era Reformasi." *Jurnal Edukasi* Vol 5, no. 1 (June 2017).
- Khoiri, Nur. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Ragam, Model Dan Pendekatan*. Semarang: SEAP Pubhising, 2017.
- Kosim, Mohammad. "Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Pada Masa Orde Lama." *Karsa* Vol 22, no. 1 (June 2014): 20.
- Mart Gultom, Fadly. "Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam Di Indonesia (Studi Tentang PP RI No. 55 Tahun 2007)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Mukhibat, M. "The Teaching Management and Study of Hadith: Method, Contents, and Approaches" 24 (2019): 11.
- Mukhibat, Mukhibat. "Virtual Pesantren Management in Indonesia: In Knowing Locality, Nationality, and Globality." *Dinamika Ilmu: Jurnal of Education* 20, no. 1 (2020): 123–32.
- Putra Daulay, Haidar. *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Raya, Moch Khafidz Fuad. "Sejarah Orientasi Pendidikan Islam di Indonesia (Dari Masa Kolonial hingga Orde Baru)." *Jurnal Pendidikan Islam* Vol 8, no. 2 (November 2018): 15.
- Rohman, Miftahur. "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Hikmah* Vol 2, no. 1 (September 2018).
- Wathoni, Kharisul. *Dinamika Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2011.

## **Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Masa Kolonial Hingga Masa Reformasi**

Yuningsih, Heni. "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru." *Jurnal Tarbiya* Vol 1, no. 1 (2015).